

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN SEMAKA TERHADAP
PELAKSANAAN PRINSIP *GOODGOVERNANCE*
PEMERINTAH KECAMATAN SEMAKA
KABUPATEN TANGGAMUS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

Abdul Aziz

NPM. 1331 0400 98

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
2019**

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN SEMAKA TERHADAP
PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
PEMERINTAH KECAMATAN SEMAKA
KABUPATEN TANGGAMUS**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S.Sos**

Oleh

Abdul Aziz

NPM. 1331 0400 98

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Oleh :
Abdul Aziz

Kualitas pelayanan pemerintah kecamatan Semaka berdasarkan kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari pengaduan atau keluhan dari masyarakat tentang pelayanan publik, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan. sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (*Good Governance*) pada Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus? Dan Berapa besar pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap persepsi masyarakat kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) dan seberapa besar pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap persepsi masyarakat kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi 88 orang yang diambil menggunakan teknik *sampling total* / sampel jenuh sehingga semua populasi menjadi sampel dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner dan analisis dilakukan dengan pengolahan data menggunakan *Program SPSS Statistics 25.0 for Windows 10*. Temuan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil temuan pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat besar dari prinsip transparansi terhadap persepsi masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip transparansi memberikan sumbangan efektif sebesar 36,7% terhadap persepsi masyarakat. Dengan kategorisasi sedang dengan 43 responden / 48,86%
2. Hasil temuan kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat kecil dari prinsip akuntabilitas terhadap persepsi masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas memberikan sumbangan efektif sebesar 28,6% terhadap persepsi masyarakat. Dengan kategorisasi sedang dengan 75 responden / 85,23%
3. Hasil temuan ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sedang dari prinsip partisipasi masyarakat terhadap persepsi masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat memberikan sumbangan efektif sebesar 34,7% terhadap persepsi masyarakat. Dengan kategorisasi sedang dengan 44 responden / 50%

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat Dan, Prinsip Good Governance



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: *Dekol H. Indro Suramin, Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703531, 780421*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka terhadap Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**

Nama Mahasiswa: **Abdul Azz**
NPM: **1331 0400 98**

Program Studi: **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas: **Ushuluddin dan Studi Agama**


MENYETUJUI


Untuk Disidangkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, September 2019


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si
NIP.19750317200312003


Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP.1978 0130211012004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam


Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP.1978 0130211012004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: J. L. H. Andri Suratmih Sukarame Bandar Lampung, Telp: (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus**. Disusun oleh **Abdul Aziz, NPM 1331040098**. Prodi : **Penikiran Politik Islam**. Fakultas **Ushuluddin dan Studi Agama**, telah dimunaqosyahkan pada hari, tanggal **Selasa, 08 Oktober 2019**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Abdul Malik Ghozli, Lc., M.A

Sekretaris : Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si

Penguji Utama : Drs. M. Nursalim Malay, M.Si

Penguji Pendamping I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Penguji Pendamping II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

DEKAN
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. M. Agil Anshori, M. Ag
NIP. 19600313198901004

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Aziz
NPM : 1331 0400 98
Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus” merupakan hasil karya peneliti dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bandar Lampung, 22 Agustus 2019

Yang menyatakan,

Abdul Aziz
1331 0400 98

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan

(Qs. At-taubah : 105)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Terucap syukur dari diri kepada Allah SWT., karena atas izin-Nya lah dapat kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang :

1. Kedua orangtuaku yang sangat aku cintai, Ibu Misriati dan Bapak Erizon yang dengan ketulusan dan segenap hatinya selalu mendo'akanku, merawatku, menjagaku, mencurahkan rasa kasih sayangnya, serta selalu memotivasi agar putrinya menggapai cita-cita yang diinginkan.
2. Untuk kedua kakak yang sangat aku sayangi, Rokhimawati dan Ali Rohman, dan juga adik yang aku sayangi, Nurul Afifah, yang menjadi pelengkap kebahagiaan dan menjadi penyemangat yang nyata untukku agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama peneliti adalah Abdul Aziz, dilahirkan di Pekon Srikuncoo Pada Tanggal 04 Mei 1995. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Erizon dan Ibu Misriati. Alamat tempat tinggal peneliti di Pekon Srikunccoro RT/RT : 02/02 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Berikut riwayat pendidikan peneliti :

1. SD Negeri 2Srikuncoo, Lulus pada tahun 2007
2. MTs Al – Hidayah Srikuncoo, Lulus pada tahun 2010
3. SMK YAPEMA Gading Rejo, Lulus pada tahun 2013

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas tepatnya pada tahun 2013, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa pada program S1 Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi gelar S.Sos

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Selain itu, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Afif Anshori, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
2. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si., selaku ketua Prodi Pemikiran Politik Islam sekaligus sebagai Pembimbing II, terimakasih telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi, nasihat, dan do'a kepada peneliti sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi, nasihat, dan do'a kepada peneliti sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.

4. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A selaku Pembimbing akademik peneliti yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan dalam hal permasalahan perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Seseorang yang selalu memberikan dukungan, tenaga, pikiran, dan semangat yang tiada henti kepada peneliti yaitu Hety Sulasih yang selalu menemani peneliti dari awal penyusunan skripsi hingga terselesainya skripsi ini.

Bandar Lampung, September 2019

Abdul Aziz
1331 0400 98

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGAESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II PERSEPSI MASYARAKAT, PELAKSANAAN PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i>	
A. Persepsi Masyarakat	
1. Pengertian Persepsi	10
2. Proses Terjadinya Persepsi	11
3. Faktor _ Faktor Persepsi	12
4. Pengertian Masyarakat	15

B. Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i>	
1. Pengertian Pelaksanaan	17
2. Pengertian <i>Good Governance</i>	19
3. Tujuan <i>Good Governance</i>	24
4. Fungsi <i>Good Governance</i>	25
5. Prinsip – Prinsip <i>Good Governance</i>	26
6. Tinjauan Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Sifat Penelitian	36
2. Populasi dan Sampel	37
3. Sumber Data.....	38
4. Metode Pengumpulan Data.....	39
5. Operasionalisasi Variabel.....	41
B. Uji Validitas dan Reliabilitas	
1. Validitas	43
2. Reliabilitas	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus	45
2. Pemerintahan Kecamatan Semaka	47
3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Semaka	48
B. Analisis Data	
1. Karakteristik Responden	48
2. Uji Validitas dan Reliabilitas	50
a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Prinsip Transparansi	50
b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Prinsip Akuntabilitas	51
c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Prinsip Partisipasi	52

C. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian.....	53
2. Kategorisasi Skor Variabel Penelitian.....	55
a. Kategorisasi Variabel <i>Good Governance</i>	55
b. Kategorisasi Variabel Transparansi	56
c. Kategorisasi Variabel Akuntabilitas	57
d. Kategorisasi Variabel Partisipasi Masyarakat.....	58
3. Pengujian Sumbangan Efektif Ketiga Prinsip <i>Good Governance</i>	58
D. Pembahasan.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Definisi Operasional	42
Tabel. 2 Jumlah Penduduk pada Kecamatan Semaka	46
Tabel. 3 Daftar Nama – Nama Camat Kecamatan Semaka	47
Tabel. 4 Jenis Kelamin Responden	48
Tabel. 5 Daftar Pekerjaan Responden	49
Tabel. 6 Distribusi Aitem Gugur dan Valid Prinsip Tranparansi	51
Tabel. 7 Distribusi Aitem Gugur dan Valid Prinsip Akuntabilitas	52
Tabel. 8 Distribusi Aitem Gugur dan Valid Prinsip Partisipasi Masyarakat	53
Tabel. 9 Deskripsi Data Penelitian	53
Tabel. 10 Kategorisasi <i>Good Governance</i>	55
Tabel. 11 Kategorisasi Transparansi	56
Tabel. 12 Kategorisasi Akuntabilitas	57
Tabel. 13 Kategorisasi Partisipasi Masyarakat	86
Tabel. 14 Sumbangan Efektif dari Ketiga Prinsip <i>Good Governance</i>	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Pemerintahan Kecamatan Semaka	48
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Skoring

Lampiran 3 Tabulasi Data

Lampiran 4 Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 5 Analisis Regresi

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7 Kartu Konsultasi

Lampiran 8 Surat Penelitian

Lampiran 9 Cek Plagiasi (Turnitin)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam Skripsi ini adalah : **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”**.

Menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul Skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan - hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).¹ Menurut Leavitt, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.²

Masyarakat Kecamatan Semaka adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki pembagian kerja secara fungsional

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. cet 26, 2008), h.51

² Harold J Leavitt, *Psikologi Manajemen*, (Ed. 4 yang dialih Bahasakan Oleh Muslichah Zarkasi. Jakarta: Penerbit Erlangga,1986), h. 63

khusus dan saling tergantung (*interdependent*), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur para anggota yang mempunyai kesadaran akan kesatuan dan perasaan, serta mampu bertindak secara kolektif dengan cara yang teratur.³ Masyarakat disini yang bertempat tinggal di Kecamatan Semaka. Kecamatan Semaka merupakan Kecamatan yang berada paling barat dari Kabupaten Tanggamus. Terdapat sekitar 22 desa / pekon di Kecamatan Semaka.

Prinsip *Good Governance* adalah dasar, asas,⁴ Pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil - hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan - gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pemabangunan.⁵ Perinsip dalam penelitian ini adalah Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

Prinsip Transparansi didefinisikan oleh Hardjasoemantri bahwa, “seluruh proses pemerintah, lembaga - lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak - pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.”⁶

Prinsip Akuntabilitas (*accountability*) berarti “pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan -

³Paul, B. Baran dan C.L. Hunt, *Sosiologi Jilid II. Ed. 6*, (Jakarta. Erlangga, 1984) h. 129

⁴<http://kbbi.web.id/prinsip> , diakses pada 15 Mei 2017

⁵Asep sulaiman.*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, h. 180.

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Good Governance dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia* (Makalah untuk lokakarya pembangunan hukum nasional ke – 7 di Bali, tanggal 15 juli, 2003)

tindakannya kepada rakyat”. Ini berarti akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah “mandat rakyat” dijalankan dengan baik atau tidak.⁷

Partisipasi Masyarakat dalam prinsip *Good Governance* menurut *UNDP*, yang dikutip oleh Batubara, didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.⁸

Berdasarkan penegasan judul diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan judul tersebut adalah Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obyektif ilmiah

Penulis tertarik dengan permasalahan ini karena melihat realitas dilapangan dimana pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Governance* belum maksimal dilakukan oleh aparat pemerintahan Kecamatan Semaka, Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah secara umum berdasarkan kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari pengaduan atau keluhan dari masyarakat tentang pelayanan publik, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja

⁷ Haryatmoko, Etika Publik untuk integritas pejabat publik dan politisi (PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building, Jakarta, 2011) h.106

⁸ Hasyim Alwi Batubara, konsep *Good Governance* dalam konsep otonomi daerah (jurnal analisis administrasi dan kebijakan, Volume 3, nomor 1, januari – april 2006)

pelayanan yang berbelit - belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan - tindakan yang berindikasi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Alasan subyektif ilmiah

- a. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan peneliti yaitu Pemikiran Politik Islam dan lokasi penelitian mudah dijangkau dengan sarana dan biaya yang tidak berlebihan.
- b. Data dalam penelitian ini mudah di dapat, literatur tersedia, sehingga peneliti bisa tepat waktu.

C. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Undang - undang nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan menjadi birokrasi yang efektif. Dalam undang - undang disebutkan, pemerintah hanya mengelola enam bidang saja yaitu : politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama serta beberapa bidang lainnya yang membawa implikasi baru dalam manajemen publik dimana domain (pedoman) pemerintah berbeda.

United Nations Development Programme merumuskan istilah *Governance* sebagai suatu penyelenggaraan (*exercise*) dari kewenangan politik, ekonomi dan

administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah - masalah sosialnya. Istilah "*Governance*" menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber - sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.⁹

Hasil penelitian *Governance and Desentralization Survey (GDS)*,¹⁰ menemukan fakta bahwa “secara umum praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik”. *Governance and Desentralitition Survey (GDS)* menemukan tiga masalah penting yang banyak terjadi dilapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan per - konco - an, kesamaan afiliasi politik, etnis, dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini menjadi penyebab munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebab pengguna jasa cenderung memilih menyuap (menyogok) dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat

⁹ Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 200

¹⁰ Agus Dwiyanto, *Governance and Desentralitition Survey (GDS)*, (Yogyakarta : Gajah Mada Univercity Press, 2003), h. 102

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian.

Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah secara umum berdasarkan kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari pengaduan atau keluhan dari masyarakat tentang pelayanan publik, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit - belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan - tindakan yang berindikasi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengacu pada beberapa uraian di atas buruknya pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Masih tingginya tingkat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa terhadap birokrasi menunjukkan bahwa pada suatu sisi kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa, pada sisi lain telah semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat pengguna jasa untuk memenuhi hak - haknya sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Namun meningkatnya

pengguna jasa tersebut ternyata masih belum diikuti dengan daya tanggap aparat birokrasi terhadap keluhan masyarakat.

Pemerintah daerah yang tidak transparan adalah pemerintah dalam memerintah suatu daerah dianggap ditutup – tutupi dan tidak mau menerima ataupun mendapatkan campur tangan dari pihak luar. Sistem pemerintahan yang tidak transparan tentunya akan menciptakan suasana yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Sedangkan dalam akuntabilitas setidaknya ada tiga aspek penting yang ditekankan dalam pengertian akuntabilitas, yakni: (i) tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah (ii) memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi” (iii) tekanan lebih pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Adapun dalam partisipasi masyarakat, suara - suara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tentang fenomena serta kejadian diatas penulis memandang masih rendahnya kualitas organisasi publik dalam menanggapi keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat yang berbasis pada pelayanan hak, dengan kata lain setiap orang atau warga negara punya hak yang sama dalam pelayanan pemenuhan hak dasarnya dan negara wajib memenuhinya.

Berdasarkan pertimbangan diatas penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat Kecamatan Semaka terhadap pelaksanaan prinsip *Good Governance*, adapun yang menjadi judul penelitian ini adalah :
“Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (*Good Governance*) pada Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ?
2. Berapa besar pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap persepsi masyarakat kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (*Good Governance*) pada Pemerintah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas dan patisipasi terhadap persepsi masyarakat Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua bentuk yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pegawai kantor camat Semaka untuk melaksanakan tugasnya sebagai agen pelayanan publik, dan menerapkan prinsip – prinsip *Good Governance* agar tercipta pemerintahan dan pelayanan yang baik serta masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan. Sebagai masukan kepada masyarakat Semaka agar dapat menjadi pengawas bagi pemerintahan kecamatan Semaka agar tidak terjadi praktek – praktek KKN.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Politik. Khususnya pada bidang Pemikiran Politik Islam.
- b. Bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan tentang pentingnya pegawai menerapkan atau melaksanakan prinsip – prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dan juga sebagai bahan masukan dalam literatur kepustakaan bagi kalangan yang berkepentingan dan tertarik pada masalah yang sama.

BAB II

PERSEPSI MASYARAKAT, PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

A. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan - bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengamati.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹²

Selanjutnya Walgito menyebutkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang diketahui oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus (rangsangan) oleh individu melalui alat penerima yaitu indera, diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya disebut proses persepsi".¹³

Persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa ataupun hubungan - hubungan yang diperoleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita

¹¹ Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), edisi ke 1, h. 44

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke 3, h. 863

¹³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta. Andi. . 2002), edisi ke 2, h.

berinteraksi dengan lingkungan akan memberi respon atau reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapat, sikap, atau ide menurut intervensi masing - masing individu. Dengan demikian persepsi / tanggapan yang diberikan masing - masing individu tidak selalu sama, walaupun dilakukan pada saat yang bersamaan. Setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau interaksi dengan individu lainnya. Artinya kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia luar atau lingkungannya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya.

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated (satu kesatuan) dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.¹⁴

2. Proses terjadinya persepsi

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek

¹⁴*Ibid*, h. 94

menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera yang diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.¹⁵

Apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi individu dalam mengadakan persepsi inilah yang disebut faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yang juga mempengaruhi individu dalam proses persepsi adalah stimulus itu sendiri, serta lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dalam diri individu dalam mengadakan persepsi.

Perbedaan persepsi ini terutama oleh faktor kepribadian. Karena tiap individu memiliki kepribadian yang berbeda - beda, wajar jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan suatu objek yang diamati.

3. Faktor – Faktor Persepsi

Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.

Faktor pertama yang dikemukakanya adalah diri orang yang bersangkutan itu sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti, motif, sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya. Motif sudah barang tentu berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan intensitas motif itu sangat

¹⁵ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: 2004, EGC), h. 94

dipengaruhi oleh mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan tersebut. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap sesuatu karena motif pemuasan kebutuhan juga berbeda. Kepentingan seseorangpun biasanya akan mempengaruhi persepsinya. Pengalamanpun turut mempengaruhi persepsi seseorang. Hal - hal tertentu yang sudah berulang kali dialami seseorang akan dipandang dengan cara yang berbeda dari cara pandang orang lain yang belum pernah mengalami.

Berkaitan dengan harapan seseorang pun turut berpengaruh terhadap persepsinya. Bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi seseorang hingga apa yang sesungguhnya dilihatnya sering diinterpretasikan lain supaya sesuai dengan dengan apa yang diharapkannya.¹⁶

Faktor kedua yang dikemukakanya adalah mengenai sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat - sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan ciri - ciri lain dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.

Sedangkan faktor terakhir yang dikemukakanya adalah faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi

¹⁶Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta.: Rineka Cipta, 1995), edisi ke 1, h. 101 - 102

merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹⁷

Sementara David Krech dan Richard, menyebutkan sebagai faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional dan faktor personal.

- a. Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal - hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor - faktor personal. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah objek - objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
- b. Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal semata - mata dari sifat. Stimulus fisik efek - efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.
- c. Faktor - faktor situasional, Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.
- d. Faktor personal. Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sangat tergantung pada aspek kepribadian, seperti motif, sikap, kepentingan, minat, harapan dan sebagainya disamping faktor situasi dan sasaran persepsi. Sesuai dengan

¹⁷*Ibid*, h. 105

¹⁸ Jalaludin rakhmat, *Psikologi Komunikasi*. (Bandung : 2000, PT. Remaja Rosdakarya), h. 52 - 58

hakikat manusia sebagai makhluk individual manusia memiliki kemampuan, motif, sikap yang khas dan tidak dimiliki oleh individu lain. Oleh sebab itu perihal terjadinya perbedaan persepsi merupakan suatu hal wajar.

Dengan demikian dari beberapa konsep persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses penafsiran seorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.

4. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka*' yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang artinya kawan.

Aristoteles mengemukakan bahwa manusia ini adalah '*zoonpoliticon*' yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersama lebih suka daripada hidup tersendiri.¹⁹ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas - batas yang jelas dan menjadi faktor

¹⁹ Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: 2007, Setia Purna Inves), h.11

utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang - orang diluar kelompoknya.

Sedangkan menurut Hasan, masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh - mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat bukanya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang - orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.²⁰

Masyarakat merupakan satu kesatuan yang selalu berubah karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Dalam zaman biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan oleh karena pengorbanan sebagai kemerdekaan dari anggota - anggotanya, baik dengan paksa maupun sukarela. Pengorbanan disini dimaksudkan menahan nafsu atau kehendak sewenang - wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Dengan paksa berarti tunduk kepada hukum - hukum yang telah ditetapkan (Negara, perkumpulan dan sebagainya) dengan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama itu (desa berdasarkan adat dan sebagainya).

Bersasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup

²⁰ Hassan Shadily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, (Jakarta: 1984, Bina Aksara), h.47

dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal - hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya.

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu²¹:

- 1) Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
- 2) Target atau objek, karakteristik - karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda - benda yang berdekatan atau yang mirip
- 3) Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur - unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

B. Pelaksanaan Prinsip *Good Governance*

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).²²

²¹ Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1, Alih Bahasa oleh Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan, Penyunting Tanty Tarigan, Edisi Kedelapan (Jakarta : 2001, PT. Prehallindo), h. 89

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke 3, h. 643

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majoe dan Wildabsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildabsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²³

Menurut Wahab, Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat - pejabat, kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pihak - pihak yang berwenang / berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita – cita / tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Sedangkan menurut Harsono, mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

²³ Nurdin usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 70

²⁴ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.2001), h. 65

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.²⁵

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu pelaksanaan baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

2. Pengertian *Good Governance*

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga - lembaga dimana warga dan kelompok - kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan - perbedaan di antara mereka.²⁶

Disisi lain istilah *Good governance* menurut Dwi merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang

²⁵Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta, Rineka Cipta.2002), h.67

²⁶ Masyarakat Transparansi Indonesia, *Good governance dan Penguatan Instansi Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia. Bekerjasama Dengan AusAID(Jakarta: 2002) h.9

sama.²⁷ Berbagai definisi *Good governance* lainnya adalah sebagai berikut.²⁸

"*Good Governance*" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "*governance*" sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*. Sedangkan arti "*good*" dalam "*good governance*" mengandung dua pengertian, pertama, nilai - nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai - nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek - aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan - tujuan tersebut. Praktek terbaiknya disebut "*good governance*" atau pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "*good governance*" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain - domain Negara, sektor swasta dan masyarakat".

Menurut Riswanda "*good governance*" diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber - sumber ekonomi

²⁷ Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance* (Raja Grafindo Pustaka, Jakarta 2003) h.45

²⁸ *Ibid*, h.47

dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*).²⁹

Menurut Sedarmayati *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of change*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi - asosiasi kerja, bahkan paguyuban.³⁰

Menurut Zulkarnain *good governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi - sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep *good governance* masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek *good governance*, maka inti *good governance* adalah seni pemerintah yang berpijak pada *rule of law* dengan elemen transparansi, akuntabilitas, *fairness*, dan *responsibility*. Elemen - elemen tersebut

²⁹ Riswanda Imawan *Membangun Good Governance*. (Raja Grafindo Pustaka, Jakarta 2002) h.32

³⁰ Sedarmayati, *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. (Bandung : Mandar Maju 2003) h.76

menyadarkan kita bahwa *good governance* adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya.³¹

Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulukadang, *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal decision making dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*).³²

Kepemerintahan ekonomi fungsinya melalui proses - proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan dibidang ekonomi mdidalam negeri dan interaksi diantara pelaku ekonomi. Kepemerintahan politik fungsinya menyangkut proses - proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Kepemerintahan administrasi adalah system pelaksanaan proses kebijakan.

Beberapa aspek yang biasa menunjukkan dijalankannya *good governance* atau pemerintahan yang baik menurut Suhardono, yaitu pertama, pengakuan atas pluaralistas politik; kedua, keadilan sosial; ketiga, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan keempat, kebebasan. Kasus - kasus yang berkembang di dunia ketiga dan upaya pembauran sistem kapitalisme dunia, telah memunculkan ide perubahan yang cukup penting, dalam, proses penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance*

³¹ Zulkarnain, *Kendala Terwujudnya Good governance* (2002) h.21

³² Pulukadang, *Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado dibidang Kepemerintahan Yang Baik* ; (Makalah, FISIP Unsrat. Manada. 2002) h.23

dalam konteks ini dapat dipandang sebagai langkah untuk menciptakan mekanisme baru yang memungkinkan Negara kembali berfungsi untuk mengatasi masalah - masalah yang justru di akibatkan oleh kerja mekanisme pasar.³³

Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* pada suatu gagasan adanya saling (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam *good governance* yang mempunyai kontrol yang *absolute*. Dengan kata lain, didalam *good governance* hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan aktor - aktor didalamnya.

Prinsip - Prinsip *Good Governance* Menurut kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang

³³ Suhardono, *Good governance Untuk Daulat Siapa?* (Forum LSM DIY, Yogyakarta. 2001)

menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya.

3. Tujuan *Good Governance*

Secara sederhana, *Good Governance* merujuk kepada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat mengikat, meningkatkan nilai jangka panjang pemilik, memaksimalkan pengembangan SDM, dan juga memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.

Dilihat dari berbagai forum *Good Governance* sudah menjadi isu penting dunia. Organisasi mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial.

Dengan dibentuknya konteks *governance* maka peran yang diemban pemerintah semakin banyak yang bisa dijalankan. Peran yang dimiliki oleh pemerintah selain peran strategi dimasa yang akan datang menurut Wibowo adalah ³⁴:

- a. Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan manusia berkelanjutan,
- b. Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah,

³⁴Eddi Wibowo, *Ilmu Politik Kontemporer* (Yogyakarta: YPPI, 2004), h. 21

- d. Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokratisasi sistem politik,
- e. Desentralisasi sistem administrasi,
- f. Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin.
- g. Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya,
- h. Melindungi lingkungan,
- i. Mempromosikan kesejahteraan.

Tanpa memiliki organisasi yang efisien, suatu negara akan sulit untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itulah, *Good Governance* menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam membangun ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan *Good Governance* menurut Mardiasmo, yaitu: “Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil (*civilsociety*) yang mandiri”.³⁵

4. Fungsi *Good Governance*

Good Governance Menurut Widodo, *Good Governance* memiliki tiga fungsi utama, yaitu³⁶:

- a. Efektivitas yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan

³⁵Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, (Andi, Yogyakarta, 2009)

³⁶Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2001)

yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

- b. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif dan profitabel dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran strategi yang memenuhi prinsip - prinsip praktek bisnis yang baik dan penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan serta dilandasi oleh nilai - nilai sosial budaya yang tinggi.
- c. Seperangkat peraturan dan ataupun sistem yang mengarahkan kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (Pemerintah, Pemegang saham, Pimpinan Perusahaan dan Karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri.

5. Prinsip - Prinsip *Good Governance*

Selama beberapa tahun belakangan ini *Good Governance* / pemerintahan yang baik marak dibicarakan sebagai solusi usaha penyesuaian terhadap perubahan - perubahan yang terjadi dalam mengelola sektor publik di segala bidang. Mengingat gelombang perubahan yang dihadapi oleh pemerintah pada masa yang akan datang akan semakin kompleks, baik itu dari tekanan eksternal maupun dari internal

masyarakatnya. Selain sebagai cara yang dinilai ampuh, *good governance* akhirnya berkembang sebagai tuntutan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sistem ini diyakini dapat mengatasi makin kompleksnya faktor - faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut, antara lain didukung oleh sifatnya yang fleksibel yaitu dapat diterapkan di semua level pemerintahan dalam suatu negara.

Terdapat beberapa rumusan prinsip *Good Governance* yang disusun oleh lembaga - lembaga yang berbeda di seluruh dunia, antara lain *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* pada tahun 2004, UNDP, *World Bank*, dan pemerintah Indonesia sendiri. Tetapi secara umum semua prinsip tersebut mengemukakan pertimbangan yang sama mengenai faktor - faktor dominan yang berpengaruh dan terkait dalam urusan publik. Prinsip - prinsip *Good Governance* menurut UNDP adalah :

a. *Participation* / Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi merupakan sistem timbal balik yang tidak hanya membutuhkan aksi dari masyarakat tetapi juga memerlukan reaksi dari pemerintah atau pejabat berwenang.

b. *Rule of Law* / Aturan Main

Penegakan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di daerah yang bersangkutan secara obyektif. Perwujudan prinsip ini memerlukan kedisiplinan masyarakat dan penegak hukum serta pemerintah itu sendiri.

c. *Transparency* / Transparansi

Transparansi berhubungan dengan kemudahan dalam memperoleh informasi perencanaan maupun kebijakan publik, proses pengambilan keputusannya dan dasar pertimbangannya. Transparansi dapat berjalan apabila terdapat kejujuran dan kesesuaian tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa sisipan kepentingan kelompok.

d. *Responsiveness* / Tanggap

Seiring dengan makin maraknya perubahan di segala bidang, maka pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik harus cepat dan tepat dalam menanggapi perubahan tersebut.

e. *Consensus orientation* / Orientasi Konsensus

Semua keputusan yang diambil berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan sedapat mungkin mengusahakan terbentuknya konsensus dalam masyarakat.

f. *Equity* / Hak akan keadilan

Kesamaan dalam hal kesempatan dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dalam praktiknya,

diharapkan tidak ada lagi kecenderungan keberpihakan pada pihak atau golongan tertentu.

g. *Efficiency and effectiveness*/efisiensi dan efektif

Efisien dan efektif dalam hal penggunaan sumber daya dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

h. *Accountability*/akuntabilitas

Tuntutan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan publik menjadi penting bagi berlangsungnya sistem pemerintahan yang baik berdasarkan kepercayaan.

i. *Strategic vision*/strategi pandangan ke depan

Orientasi pemerintah dan masyarakat terhadap visi jangka panjang, tidak hanya tujuan jangka pendek yang sesaat.

Sedangkan dalam pemerintahan Negara Indonesia sendiri konsep Good Governance diidentifikasi sebagai suatu pemerintahan yang profesional, menegakkan supremasi hukum dan HAM, transparan, akuntabilitas, bersih, demokratis, desentralistik, partisipatif, berkeadilan, berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan daya saing. Unsur - unsur yang dicakup dalam konsep tersebut menunjukkan proses yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan urusan - urusan publik mengingat hubungannya bukan hanya internal pemerintahan tetapi juga mengenai kondisi dan respon eksternal publik sebagai obyek pelayanan

pemerintah. Pelaksanaan konsep *Good Governance* pada kenyataannya tidak mudah. Konsep ideal yang dirumuskan untuk mengarahkan pembangunan negara menjadi lebih baik ini ternyata tidak akan menghasilkan perubahan yang diinginkan jika struktur dan sistem pemerintahan yang menyelenggarakannya masih bersifat konvensional. Tuntutan - tuntutan secara otomatis muncul seiring dengan meluasnya pewacanaan konsep *Good Governance* di kalangan masyarakat. Implikasi secara umum yang terjadi adalah tuntutan akan adanya reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik.

Loina dalam jurnal BAPPENAS menyimpulkan bahwa jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintah yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip - prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Partisipasi Masyarakat.³⁷

1) Prinsip Akuntabilitas.

Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Disamping itu juga merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan

³⁷Loina Lalolo Krina. *Indikator Alat Ukur Prinsip kuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. (Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.2003)

sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya dengan kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumber daya serta transparan dalam manajemen keuangan, pandangan, accounting, dan pengumpulan sumber daya.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah: “Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”. Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya³⁸:

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan.
- b. Kejelasan sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi dengan prinsip - prinsip administrasi yang benar.
- c. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
- d. Pertanggungjawaban telah disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan undang - undang yang berlaku.

³⁸Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 18

2) Prinsip Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh dari yang membutuhkan. Transparansi juga diartikan sebagai keterbukaan lembaga - lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan disclosure kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan. Tujuan transparansi ini membangun rasa saling percaya antar pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi yang andal berkaitan dengan masalah - masalah hukum, pengaturan, dan hasil - hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan .

Komite Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan transparansi adalah: “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang - undangan”³⁹.

Ada beberapa indikator dari transparansi, diantaranya:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur - prosedur, biaya - biaya dan tanggung jawab.

³⁹<https://www.ksap.org/sap/profil-ksap/> (diakses pada tanggal 08 Januari 2019, pukul 10.35 WIB)

- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

3) Prinsip Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.⁴⁰

Ada 2 indikator partisipasi, diantaranya:

- a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka.
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

6. Tinjauan Pelaksanaan *Good Governance*

Pelaksanaan *Good Governance* yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus berkerja secara sinergis, yang berarti setiap pilar diharapkan mampu

⁴⁰Mardiasmo, *OpCit.* h.18

menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif.

Sehingga apa yang didambakan Indonesia dan instansi pemerintah menjadi negara yang *Good Governance* dapat terwujud dan hilangnya faktor - faktor kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membahas pemerintah lebih baik masih belum bisa tercapai. Masyarakat dan pemerintah yang masih bertolak belakang untuk mengatasi masalah tersebut seharusnya menjalin harmonisasi dan kerjasama mengatasi masalah - masalah yang ada.

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dan semakin serbat. Oknum - Oknum organisasi pemerintah yang seyoganya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintah yang baik atau yang sering di sebut *Good Governance* yang selama ini dieluk - elukan, faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Sehubung dengan itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan lembaga - lembaga donor internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sekarang menjadi salah satu kunci dalam untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.⁴¹

Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai *Good Governance*. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Indonesia dan instansi pemerintah adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan *Good Governance*. Untuk mencapai *Good Governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip - prinsip *Good Governance* hendaknya ditegakan dalam berbagai institusi penting pemerintah, prinsip - prinsip tersebut meliputi: akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.⁴²

⁴¹Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University. 2008)

⁴²Loina Lalolo Karina, *OpCit*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat tergantung pada permasalahan dan sifat penelitian, sebelum penulis mengemukakan metode penelitian ini, ada baiknya kita mengetahui hal - hal yang berhubungan dengan metode tersebut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data yang ada dilapangan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah - masalah praktis dalam kehidupan sehari - hari.

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya⁴³

⁴³Mudji santoso dalam *jurnal penelitian kuantitatif*, h. 12

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan pada dasarnya bersifat deskriptif kuantitatif. Menurut Sangadji penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Sementara menurut Cooper, H.M penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.⁴⁴

2. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kreatifitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵ Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah seluruh masyarakat Kecamatan Semaka yang pernah melakukan pelayanan publik di kantor Kecamatan Semaka dengan jumlah 88 orang yang terdiri dari 56 laki – laki dan 32 perempuan.

b. Sample

Menurut Arikunto sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya Arikunto mengatakan bahwa sebagai acuan - acuan, jika peneliti mempunyai beberapa ratus subyek dalam populasi,

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM,1986), Jilid 1, h. 3.

⁴⁵ Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan R&D*. (Bandung: Alfabet Bandung. 2014). h. 117.

mereka dapat menentukan kurang lebih 25% - 30% dari jumlah subyek tersebut. Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi antara 100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket / kuesioner, sebaiknya subyek sejumlah itu diambil seluruhnya.⁴⁶

Peneliti mengambil teknik sampling yang digunakan ialah *Sampling Total* atau sampel jenuh, merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti mengambil sampel penelitian yang berjumlah 88 responden yang terdiri dari seluruh masyarakat yang pernah melakukan pelayanan publik di kantor Kecamatan Semaka.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan / memerlukannya.⁴⁷ Jadi data primer merupakan dari hasil angket atau kuisisioner dan juga dokumen yang diberikan kepada 88 responden dalam penelitian.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, pt rineka cipta,2010) h. 117

⁴⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok - pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2002), h. 81.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga data yang tersedia.⁴⁸ Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku - buku, literatur, karya - karya dan dokumentasi terkait penelitian. Data disini merupakan data statistik kependudukan dan data tentang lokasi penelitian Kecamatan Semaka.

Dua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

4. Metode Pengumpulan data

a. Kuisisioner

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan harapan dapat mengetahui variabel - variabel apa saja yang menurut responden merupakan hal yang penting. Yang menjadi dasar pembatasan menentukan variabel - variabel tersebut adalah harus dapat dimengerti dan dirasakan manfaatnya. Kuesioner dapat berfungsi sebagai alat dan sekaligus teknik pengumpulan data yang berisi sederet pertanyaan dalam wujud konkrit.

Penyusunan kuesioner dilakukan dalam bentuk pertanyaan tertutup. Yang dimaksud dengan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membawa

⁴⁸*Ibid.*

responden ke jawaban yang alternatifnya sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan dengan memberi tanda 'x'.⁴⁹

Dalam hal ini, kuesioner untuk konsumen dibagi jadi 2 (dua) bagian, yaitu

- a) Bagian I berisi tentang pertanyaan mengenai data umum responden.
- b) Bagian II berisi pertanyaan mengenai pelaksanaan Prinsip *Good Governance*. Bentuk pertanyaan adalah tertutup dan responden menentukan pilihan jawaban berdasarkan apa yang sudah ditentukan.

Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip *Good Governance*.

Adapun skala pengukuran data yang dipakai adalah skala *likert*. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.⁵⁰ Untuk membantu dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor. Teknik pengumpulan skor yang akan digunakan adalah dengan skala ordinal untuk menilai jawaban kuisisioner responden.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta, Bina Aksara, 1997), h. 151

⁵⁰Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h., 132.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah ”pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip - arsip juga termasuk buu - buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum - hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.⁵¹ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis atau arsip kegiatan instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan Semaka kabupaten tanggamus. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data yang diperoleh melalui kuisisioner atau angket dan observasi.

5. Operasionalisasi Variabel

Didalam penelitian disamping mengidentifikasi variabel yang akan dikumpulkan, perlu diberi definisi operasional, setiap variabel yang sudah diidentifikasi, definisi oprasional variabel berisikan indikator - indikator dari suatu variabel yang memungkinkan penelitian mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut.

Penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri - ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep tujuannya agar penelitian dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasional alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya adapun definisi operasional variabel adalah sebagai berikut.

⁵¹*Ibid.*, h.133.

1. Variabel dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap prinsip *Good Governance* (Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi)
2. Definisi Oprasional adalah seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam konsep.⁵²

Prinsip *Good Governance*, merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ketiga prinsip yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan *Good Governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi⁵³. Di dalam prinsip – prinsip tersebut terdapat indikator – indikator yang menjadi penilaian yang dapat diukur, sehingga menjadi standar pelaksanaan prinsip tersebut

Tabel. 1
Definisi Oprasional

No	Variabel	Konseptual	Operasional	Indikator
1	Transparansi	seluruh proses pemerintah, Lembaga - lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak - pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau	- Adanya akses informasi yang mudah di dapat, jelas dan tepat waktu - tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik	- adanya papan pemberitahuan informasi atau papan pengumuman - tersedianya brosur / baliho pemberitahuan - tersedianya laman web instansi
2	Akuntabilitas	pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan - tindakannya	- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.	- Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan - Adanya pelayanan yang

⁵²Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu - Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h.. 177.

⁵³Sedarmayanti, *reformasi administrasi publik reformasi birokrasi dan kepemimpinan masa depan*, (Bandung, pt refika aditama, 2009) h. 289 - 290

		kepada rakyat. Ini berarti akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah “mandat rakyat” dijalankan dengan baik atau tidak	- Adanya sanksi yang di tetapkan pada kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	cermat dan biaya murah - Adanya laporan pertanggung jawaban dari kinerja pegawai
3	Partisipasi	dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.	- pemahaman penyelenggara daerah tentang proses atau metode partisipatif - Adanya pengambilan keputusan yang di dasarkan atas consensus bersama - Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan untuk pembangunan daerah	- Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat - Adanya hak masyarakat dalam pembuatan kebijakan - Adanya kotak kritik dan saran

B. Uji Validitas dan Reabilitas

a. Validitas

Menurut Azwar, validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes.⁵⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian validitas di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa validitas adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan ketepatan dan kesahihan suatu instrumen. Penulis

⁵⁴Azwar, S. *Reliabilitas dan Validitas*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar1997) h. 33

menggunakan tipe validitas isi dimana validitas isi menunjukkan sejauhmana aitem - aitem dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh tes itu.

b. Reliabilitas

Menurut Sugiono, Pengertian Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan (konsistensi) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda - beda.⁵⁵

Berdasarkan pendapat tentang pengertian reliabilitas di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa reliabilitas adalah keajegan suatu tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Teknik yang digunakan dalam melakukan pengukuran reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*.⁵⁶

⁵⁵ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 132.

⁵⁶ Azwar, S. *Reliabilitas dan Validitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997) h. 35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Kecamatan Semaka adalah salah satu Kecamatan yang berada di kabupaten Tanggamus yang terletak paling barat yang berbatasan langsung dengan Pesisir Barat.

Kecamatan Semaka terbentuk menjadi Kecamatan Definitif di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 28 Agustus tahun 2000 berdasarkan peraturan daerah Nomor 18 tahun 2000, yang diundangkan pada tanggal 28 Juni 2000. Sebagai salah satu Kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang terletak di sebelah barat dari jalur lintas Barat. Untuk Kecamatan Semaka dituntut memacu pelaksanaan pembangunan dan kesiapannya dalam mendukung Kabupaten Tanggamus menghadapi Otonomi Daerah sebagaimana diatur Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999. Penyelenggaraan otonomi Daerah sebagaimana diatur Undang - undang tersebut pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh kepada daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan prinsip keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah

Kecamatan Semaka merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dengan luas 17.090 Ha dan mempunyai 22 desa / pekon, yaitu

Tugu Papak, Karang Rejo, Garut, Sidodadi, Kacapura, Tugurejo, Bangun Rejo, Sukaraja, Sedayu, Kanoman, Sudimoro, Sudimoro Bangun, Way Kerap, Sri Purnomo, Sri Kuncoro, Sri Katon, Pardawaras, Karang Agung, Sido Mulyo, Tulung Asahan, Margomulyo, Suka Jaya.

Tabel. 2
Jumlah Penduduk pada Kecamatan Semaka

No	Pekon	Jenis Kelamin		Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Tugu Papak	878	825	1.703
2	Karang Rejo	733	715	1.448
3	Garut	360	328	688
4	Sidodadi	619	554	1.173
5	Kacapura	795	749	1.544
6	Tugurejo	332	346	678
7	Bangun Rejo	609	589	1.198
8	Sukaraja	1.814	1.700	3.514
9	Sedayu	1.248	1.147	2.395
10	Kanoman	912	876	1.788
11	Sudimoro	1.119	1.064	2.183
12	Sudimoro Bangun	939	880	1.819
13	Way Kerap	883	784	1.667
14	Sri Purnomo	1008	961	1.969
15	Sri Kuncoro	1241	1.139	2.380
16	Sri Katon	1310	1.185	2.495
17	Pardawaras	787	677	1.464
18	Karang Agung	676	562	1.238
19	Sidomulyo	1064	945	2.009
20	Tulung Asahan	514	438	952
21	Margomulyo	289	245	534
22	Suka Jaya	305	278	583
Jumlah		18.435	16.987	35.422

Berdasarkan tabel tersebut dapat di ketahui jumlah penduduk Kecamatan Semaka menurut jenis kelamin dan desa / pekon, jumlah penduduk laki – laki berjumlah 18.435 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 16.987 jiwa, dengan jumlah total 35.422 jiwa yang tinggal pada Kecamatan Semaka. Jika dilihat pada tabel penduduk paling banyak adalah pekon Sukaraja yang berjumlah 3.514 jiwa, pekon Sukaraja yang sekaligus Ibukota Kecamatan Semaka.

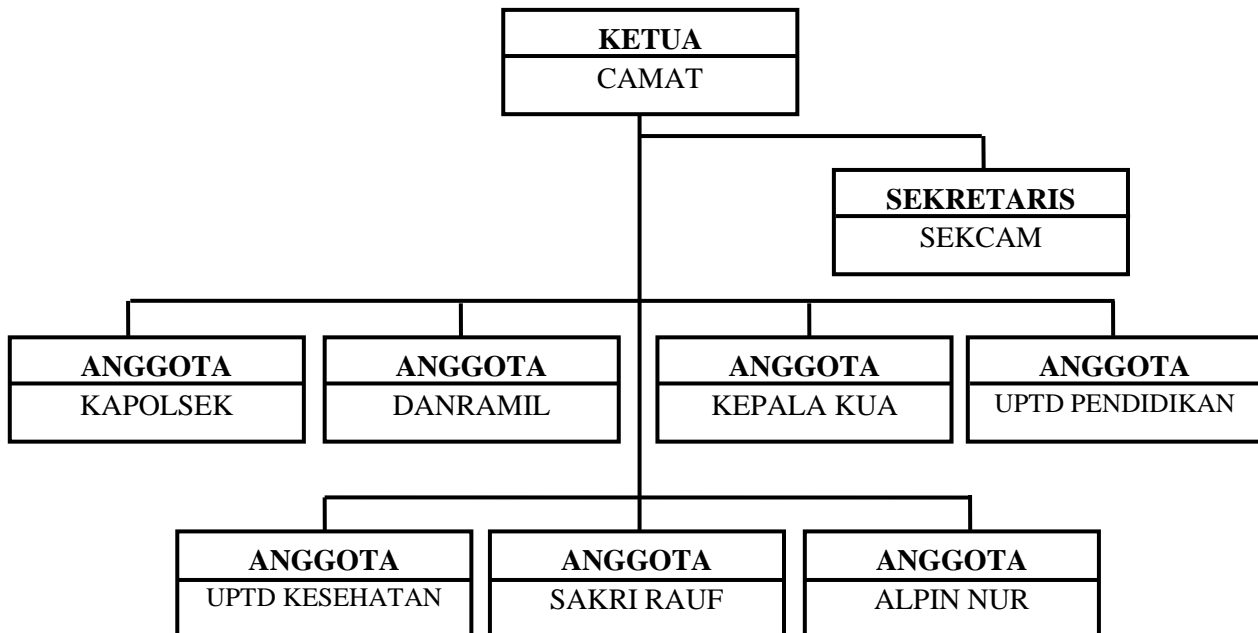
2. Pemerintahan Kecamatan Semaka

Pemerintahan Kecamatan Semaka berpusat pada pekon sukaraja yang ditetapkan sejak tanggal 28 Agustus 2000 berdasarkan peraturan daerah Nomor 18 tahun 2000. Berikut ini adalah nama – nama camat yang pernah menjabat di Kecamatan Semaka.

Tabel. 3
Daftar Nama – Nama Camat Kecamatan Semaka

No	Nama	Periode
1	Drs. Hotman Jauhari	1987 – 1995
2	Sukeri, BA	1995 – 1998
3	El. Zuhim Nunyai, BA	1998 – 1999
4	Helmi, S.Sos	1999 – 2006
5	Edi Narimo, S.H	2006 – 2008
6	Jumaidi, S.H	2008 – 2009
7	Drs. Anas Anshori, M.Si	2009 – 2010
8	Rozi Zaini, S.E, M.M	2010 – 2011
9	Drs. A. Syarief, M.Si	2011 – 2013
10	Hermansyah, S.Sos	2013 – 2016
11	Wiwin Triani, S.E	2016 – 2017
12	Edy Fahrurrozi, M.M	2017 – 2018
13	Suyanto	2018 – 2019
14	Wiwin Triani, S.E	2019 - sekarang

3. Struktur Kecamatan Semaka



Gambar. 1 Struktur Pemerintahan Kecamatan Semaka

B. Analisis Data

1. Karakteristik Responden

Sebelum melakukan tahap analisa data, terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai keterangan – keterangan responden dalam penelitian ini :

a. Jenis Kelamin

Tabel. 4
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
1	laki laki	56	63.6
2	Perempuan	32	36.4
Total		88	100.0

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut, dapat di ketahui tentang jenis kelamin responden yaitu Masyarakat Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang di ambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki – laki sebanyak 56 orang dengan persentase sebesar 63.6 %, sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 32 orang dengan persentase 36.4 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Semaka yang menjadi responden adalah laki – laki.

b. Pekerjaan

Tabel. 5
Daftar Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persen
1	Buruh	16	18.2%
2	Swasta	21	23.9%
3	Wirausaha	16	18.2%
4	IRT	15	17.0%
5	lain - lain	20	22.7%
	Total	88	100%

Berdasarkan data dari tabel di atas diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai Buruh berjumlah 16 orang dengan persentase sebesar 18.2%, responden yang bekerja sebagai Swasta berjumlah 21 orang dengan persentase 23.9 %, responden yang bekerja sebagai Wirausaha berjumlah 16 orang dengan persentase 18.2 %, responden yang bekerja sebagai IRT berjumlah 15 orang dengan persentase 17.0 %, sedangkan dengan pekerjaan lain – lain (Mahasiswa dan pelajar) berjumlah 20 orang dengan persentase 22.7 %

2. Uji Validitas dan reliabilitas

Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan jasa program komputer *SPSS versi 25.0 for windows*. Seleksi atau dasar pengambilan keputusan aitem yang valid dengan cara membandingkan nilai r tabel dengan r hasil. Pada penelitian ini nilai r tabel yang digunakan adalah koefisien $r_{ix} > 0,3$ maka aitem dinyatakan valid, sebaliknya jika $r_{ix} < 0,3$ maka aitem dinyatakan tidak valid.⁵⁷

Untuk mengetahui tingkat validitas dari setiap pertanyaan pada kuisioner, maka akan dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 25, adapun hasil *Output* perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pada Prinsip Transparansi

Hasil uji validitas pada prinsip transparansi, dapat diketahui bahwa 10 aitem yang telah diujicobakan koefisien korelasi berkisar 0,395 sampai 0,804, sedangkan uji koefisien reliabilitas prinsip transparansi memiliki nilai $\alpha = 0,896$ yang berarti aitem sangat reliabel. Setelah diperoleh koefisien korelasi untuk masing - masing aitem, selanjutnya diambil aitem yang koefisien korelasinya dibawah 0,3 untuk dihilang Sebaran aitem prinsip transparansi yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 6.

⁵⁷Azwar, S. *Metode Penelitian Kuantitatif*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar1997) h. 29

Tabel. 6
Distribusi Aitem Gugur dan Valid Prinsip Transparansi

No.	Prinsip Transparansi	Aitem total	Aitem		Koefisien korelasi
			Valid	Gugur	
1.	Adanya papan informasi	4	4	-	0,641 - 0,804
2.	Tersedianya brosur / baliho	3	3	-	0,395 - 0,726
3.	Tersedianya laman web Instansi	3	3	-	0,684 - 0,688
Jumlah		10	10	-	0,395 - 0,804

Pada tabel ditunjukkan bahwa tidak terdapat aitem yang dihilangkan atau dinyatakan sebagai aitem gugur karena memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,3. Dengan demikian, prinsip transparansi dianggap sangat baik sebagai alat ukur penelitian.

b. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pada Prinsip Akuntabilitas

Hasil uji validitas pada Prinsip Akuntabilitas, dapat diketahui bahwa 10 aitem yang telah diujicobakan koefisien korelasi berkisar 0,398 sampai 0,643, sedangkan uji koefisien reliabilitas Prinsip Akuntabilitas memiliki nilai $\alpha = 0,844$ yang berarti aitem sangat reliabel. Setelah diperoleh koefisien korelasi untuk masing - masing aitem, selanjutnya diambil aitem yang koefisien korelasinya dibawah 0,3 untuk dihilangkan. Sebaran aitem Prinsip Akuntabilitas yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel. 7
Distribusi Aitem Gugur dan Valid Prinsip Akuntabilitas

No.	Prinsip Akuntabilitas	Aitem total	Aitem		Koefisien korelasi
			Valid	Gugur	
1.	Ketepatan Waktu pelaksanaan pelayanan	3	3	-	0,398 - 0,568
2.	Adanya pelayanan yang cermat dan biaya murah	4	4	-	0,437 - 0,643
3.	Adanya laporan pertanggungjawaban dari kinerja pegawai	3	3	-	0,478 - 0,631
Jumlah		10	10	-	0,398 - 0,643

Pada tabel ditunjukkan bahwa tidak terdapat aitem yang dihilangkan atau dinyatakan sebagai aitem gugur karena memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,3. Dengan demikian, Prinsip Akuntabilitas dianggap sangat baik sebagai alat ukur penelitian.

c. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pada Prinsip Partisipasi Masyarakat

Hasil uji validitas pada Prinsip Partisipasi Masyarakat, dapat diketahui bahwa 10 aitem yang telah diujicobakan koefisien korelasi berkisar 0,439 sampai 0,695, sedangkan uji koefisien reliabilitas Prinsip Partisipasi Masyarakat memiliki nilai $\alpha = 0,860$ yang berarti aitem sangat reliabel. Setelah diperoleh koefisien korelasi untuk masing - masing aitem, selanjutnya diambil aitem yang koefisien korelasinya dibawah 0,3 untuk dihilang Sebaran aitem Prinsip Partisipasi Masyarakat yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 8

Tabel. 8
Distribusi Aitem Gugur dan Valid Prinsip Partisipasi Masyarakat

No.	Prinsip Partisipasi Masyarakat	Aitem total	Aitem		Koefisien korelasi
			Valid	Gugur	
1.	Adanya musyawara yang melibatkan masyarakat	3	3	-	0,460 - 0,623
2.	Adanya hak masyarakat dalam pembuatan keputusan	3	3	-	0,485 - 0,695
3.	Adanya kotak kritik dan saran	4	4	-	0,439 - 0,605
Jumlah		10	10	-	0,439 - 0,695

Pada tabel ditunjukkan bahwa tidak terdapat aitem yang dihilangkan atau dinyatakan sebagai aitem gugur karena memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,3. Dengan demikian, Prinsip Partisipasi Masyarakat dianggap sangat baik sebagai alat ukur penelitian.

C. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Hasil dari data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat Kecamatan Semaka yang pernah melakukan pelayanan pada Pemerintah Kecamatan Semaka merupakan data skor yang sudah dianalisis dengan perhitungan statistik sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel. 9
Deskripsi Data Penelitian

Variabel	Σ aitem	Skor Empirik				Skor Hipotetik			
		Min	Maks	Mean	Sd	Min	Maks	Mean	Sd
<i>Good Governace</i>	30	30	120	70,15	16,73	30	120	75	15
Transparansi	10	10	40	22,27	6,274	10	40	25	5
akuntabilitas	10	10	40	24,96	5,156	10	40	25	5
Partisipasi Masyarakat	10	10	40	22,92	5,921	10	40	25	5

Keterangan skor hipotetik :

- a. Skor minimal (X_{min}) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan nilai terendah dari pembobotan pilihan jawaban
- b. Skor maksimal (X_{maks}) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan nilai tertinggi dari pembobotan pilihan jawaban
- c. Rerata hipotetik (μ) dengan rumus $\mu = (\text{skor min} + \text{skor maks}) : 2$
- d. Standar deviasi (σ) hipotetik adalah : $\sigma = (\text{skor maks} - \text{skor min}) : 6$

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat variabel yang memiliki uraian statistik pada skor empirik dan skor hipotetik berupa jumlah aitem, skor minimum, skor maksimum, mean, dan standar deviasi. Skor empirik pada variabel *Good Governmance* menunjukkan mean dengan skor 70,15 sedangkan pada skor hipotetik menunjukkan mean dengan skor 75 yang berarti bahwa skor hipotetik *Good Governmance* lebih besar dari skor empiriknya. Pada variabel *Transparansi* dapat diketahui bahwa skor empirik variable *transparansi* menunjukkan mean sebesar 22,27, sedangkan pada skor hipotetik variable *transparansi* menunjukkan mean sebesar 25 yang berarti bahwa skor hipotetik variable *transparansi* lebih besar dari skor empiriknya. Pada variable *akuntabilitas* menunjukkan skor empirik skala variable *akuntabilitas* sebesar 24,96, sedangkan pada skor hipotetik variable *akuntabilitas* sebesar 25 yang berarti bahwa skor hipotetik lebih besar dari pada skor empirik. Pada variable *partisipasi masyarakat* menunjukkan skor empirik skala variable *akuntabilitas* sebesar 22,92, sedangkan pada skor hipotetik variable *akuntabilitas* sebesar 25 yang berarti bahwa skor hipotetik lebih besar dari pada skor empirik

2. Kategorisasi Skor Variabel Penelitian

Setelah mendeskripsikan data penelitian, peneliti mengkategorisasikan skor penelitian pada masing - masing variabel. Hal tersebut bertujuan untuk menempatkan individu menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang telah diukur dalam kelompok - kelompok yang terpisah secara berjenjang. Azwar, penentuan kategorisasi skor variabel penelitian ialah dengan memperhatikan bagaian - bagian berikut ini. Rentang Tinggi (skor hipotetik) = skor maks – skor min, Rentang Sedang = hasil rentang tinggi – skor min, Rentang Rendah = hasil dari rentang sedang.⁵⁸

Berikut tabel norma skor yang telah di sajikan. Setelah kategori tersebut didapatkan, maka akan diperoleh nilai persentasi kategori untuk masing - masing variabel.

a. Kategorisasi Variabel *Good Governance*

Tabel dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan sebuah variabel *Good Governance* yang terdiri dari 30 aitem yang berhubungan dengan *Good Governance*. yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Tabel. 10
Kategorisasi *Good Governance*

No.	Kategori	Rentang Skor	Frekuensi	%
1.	Tinggi	$90 \leq X$	13	14,78%
2.	Sedang	$60 \leq X < 90$	51	57,95%
3.	Rendah	$X < 60$	24	27,27%
Total			88	100%

⁵⁸ Azwar, S. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997) h. 26

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kategorisasi variabel *Good Governance* terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi dengan rentang skor $90 \leq X$ dapat diperoleh oleh 13 responden dengan persentase sebesar 14,78%. Kategori sedang dengan rentang skor $60 \leq X < 90$ diperoleh oleh 51 responden dengan persentase 57,92%. Sedangkan pada kategori rendah dengan skor $X < 60$, dapat diperoleh oleh 24 responden dengan persentase sebesar 27,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Good Governance* berada pada kategori sedang.

b. Kategorisasi variabel Transparansi

Tabel dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan sebuah variabel transparansi yang terdiri dari 10 aitem yang berhubungan dengan transparansi yang diterapkan dimasyarakat Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Tabel. 11
Kategorisasi Transparansi

No.	Kategori	Rentang Skor	Frekuensi	%
1.	Tinggi	$30 \leq X$	10	11,36%
2.	Sedang	$20 \leq X < 30$	43	48,86%
3.	Rendah	$X < 20$	35	39,78%
Total			88	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategorisasi variabel transparansi terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi dengan rentang skor $30 \leq X$ dapat diperoleh oleh 10 responden dengan persentase sebesar 11,36%. Kategori sedang dengan rentang skor $20 \leq X < 30$ diperoleh oleh 43 responden dengan persentase 48,86%. Sedangkan pada kategori

rendah dengan skor $X < 20$, dapat diperoleh oleh 35 responden dengan persentase sebesar 39,78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi pada Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus berada pada kategori sedang.

c. Kategorisasi Akuntabilitas

Tabel dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan sebuah variabel akuntabilitas yang terdiri dari 10 aitem yang berhubungan dengan akuntabilitas pada kecamatan semaka kabupaten tanggamus. yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah

Tabel. 12
Kategorisasi Akuntabilitas

No.	Kategori	Rentang Skor	Frekuensi	%
1.	Tinggi	$30 \leq X$	5	5,68%
2.	Sedang	$20 \leq X < 30$	75	85,23%
3.	Rendah	$X < 20$	8	9,09%
Total			88	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategorisasi variabel akuntabilitas terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi dengan rentang skor $30 \leq X$ dapat diperoleh oleh 5 responden dengan persentase sebesar 5,68%. Kategori sedang dengan rentang skor $20 \leq X < 30$ diperoleh oleh 75 responden dengan persentase 85,23%. Sedangkan pada kategori rendah dengan skor $X < 20$, dapat diperoleh oleh 8 responden dengan persentase sebesar 9,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pada Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus berada pada kategori sedang.

d. Kategorisasi Partisipasi Masyarakat

Tabel dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan sebuah variabel akuntabilitas yang terdiri dari 10 aitem yang berhubungan dengan akuntabilitas pada kecamatan semaka kabupaten tanggamus. yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah

Tabel. 13
Kategorisasi Partisipasi Masyarakat

No.	Kategori	Rentang Skor	Frekuensi	%
1.	Tinggi	$30 \leq X$	10	11,36%
2.	Sedang	$20 \leq X < 30$	44	50%
3.	Rendah	$X < 20$	34	36,64%
Total			88	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategorisasi variabel partisipasi masyarakat terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi dengan rentang skor $30 \leq X$ dapat diperoleh oleh 10 responden dengan persentase sebesar 11,36%. Kategori sedang dengan rentang skor $20 \leq X < 30$ diperoleh oleh 44responden dengan persentase 50%. Sedangkan pada kategori rendah dengan skor $X < 20$, dapat diperoleh oleh 34 responden dengan persentase sebesar 36,64%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pada Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus berada pada kategori sedang.

3. Pengujian Sumbangan Efektif Ketiga Prinsip *Good Governance*

Sumbangan ketiga prinsip *Good Governance* telah diketahui yaitu sebesar 100%. Selanjutnya sumbangan efektif dari masing - masing ketiga prinsip *Good*

Governance. Sumbangan efektif merupakan ukuran sumbangan suatu prediktor terhadap keseluruhan efektifitas garis regresi yang digunakan sebagai dasar prediksi.⁵⁹ Sumbangan efektif dari ketiga prinsip *Good Governance* memiliki jumlah yang sama dengan *R - square*.

Tabel. 14
Sumbangan Efektif dari ketiga prinsip *Good Governance*

Variabel	Koefisien Regresi (Beta)	Sumbangan Efektif (%)
Transparansi (X1)	0,375	36,7%
Akuntabilitas (X2)	0,308	28,6%
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,354	34,7%

Tabel di atas menunjukkan bahwa masing - masing prinsip *Good Governance* memiliki sumbangan efektif terhadap *Good Governance*. *Pertama* sumbangan efektif pada prinsip transparansi sebesar 36,7%. *Kedua* sumbangan efektif pada prinsip akuntabilitas sebesar 28,6%. *Ketiga* sumbangan efektif pada prinsip partisipasi masyarakat sebesar 34,7%

Hasil tersebut menjelaskan bahwa tiga prinsip *Good Governance* memiliki pengaruh yang berbeda terhadap *Good Governance*. Prinsip transparansi memberikan pengaruh yang besar dengan sumbangan efektif sebesar 36,7%. pada aspek akuntabilitas memberikan pengaruh yang sangat kecil dibandingkan dengan variabel lain yaitu dengan sumbangan efektif 28,6%. Sedangkan aspek partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang kecil dengan sumbangan efektif sebesar 34,7%.

⁵⁹Winarsunu, T. *Stastistik dalam penelitian psikologi & pendidikan*. (Malang. UMM press.2015) h. 43

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat). Dalam penelitian ini prinsip *Good Governance* akan dibagi menjadi tiga prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dari ketiga prinsip tersebut peneliti ingin mengetahui prinsip mana yang berpengaruh besar terhadap *Good Governance*. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan tiga hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk melihat ada tidaknya pengaruh pada prinsip *Good Governance*. Proses analisis tersebut menggunakan bantuan program *SPSS 25.0 for windows*.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 88, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *sampling total* / sampel jenuh sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Subjek penelitian ialah seluruh masyarakat kecamatan Semaka yang pernah melakukan pelayanan pada pemerintah kecamatan Semaka. Penelitian ini terdapat empat temuan yang diajukan.

Hasil temuan pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat besar dari prinsip transparansi dengan sumbangan efektif sebesar 36,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh dari prinsip transparansi maka pemerintahan Kecamatan Semaka mendapat persepsi yang positif dari masyarakat kecamatan Semaka. Penelitian ini terdapat tiga kategorisasi yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh kategorisasi prinsip transparansi berbeda - beda. Kategori prinsip transparansi

tinggi sebanyak 10 subjek dengan persentase 11,36%, pada kategori tinggi dapat dikatakan bahwa masyarakat kecamatan Semaka dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pada kategori sedang sebanyak 43 subjek dengan persentase 48,86%, pada kategori sedang dapat dikatakan bahwa keterbatasan akses dalam memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat kecamatan Semaka. Sedangkan kategori rendah terdapat 35 subjek dengan persentase 39,78%. pada kategori rendah dapat dikatakan bahwa dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, informasi melalui media juga tidak terlalu efektif karena tidak semua masyarakat mengkonsumsi media cetak.

Berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Meutiah bahwa Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.⁶⁰ Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan infoermasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan

⁶⁰Buku Pedoman *Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, (Bappenas dan Depdagri 2002, h.18

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.⁶¹

Hasil temuan kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat besar dari prinsip akuntabilitas dengan sumbangan efektif sebesar 28,6%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh dari prinsip akuntabilitas maka pemerintahan Kecamatan Semaka mendapat persepsi yang positif dari masyarakat kecamatan Semaka. Penelitian ini terdapat tiga kategorisasi yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh kategorisasi prinsip akuntabilitas berbeda - beda. Kategori prinsip akuntabilitas tinggi sebanyak 5 subjek dengan persentase 5,68%, pada kategori tinggi dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan Semaka dapat bertanggung jawab atas kinerjanya dalam melakukan pelayanan dan kejelasan sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi dengan prinsip - prinsip administrasi yang benar. Pada kategori sedang sebanyak 75 subjek dengan persentase 85,23%, pada kategori sedang dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan semaka belum maksimal dalam melaporkan hasil penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Sedangkan kategori rendah terdapat 8 subjek dengan persentase 9,09%. pada kategori rendah dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan Semaka kurang bertanggungjawab atas pelayanan, dapat dilihat dari adanya biaya tambahan untuk memperlancar pelayanan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan

⁶¹Meuthia Ganie Rahman, "Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya" dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, (Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000) h.151

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁶² Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintahan daerah untuk meleksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggungjawabkan dihadapan publik maupun dari kacamata hukum.⁶³

Hasil temuan ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat besardari prinsip partisipasi masyarakat dengan sumbangan efektif sebesar 34,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh dari prinsip partisipasi masyarakat maka pemerintahan Kecamatan Semaka mendapat persepsi yang positif dari masyarakat kecamatan Semaka. Penelitian ini terdapat tiga kategorisasi yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh kategorisasi prinsip partisipasi masyarakat berbeda - beda. Kategori prinsip akuntabilitas tinggi sebanyak 10 subjek dengan persentase 11,36%, pada kategori tinggi dapat dikatakan bahwa masyarakat kecamatan Semaka ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dibuat dalam pemerntahan kecamatan Semaka. Pada kategori sedang sebanyak 44 subjek dengan persentase 50%, pada kategori sedang dapat dikatakan bahwa masyarakat kecamatan semaka masih kurang dilibatkan, akibatnya kebijakan atau program yang ditempuh oleh

⁶²Sedarmayati. *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. (Bandung : Mandar Maju.2003)h.23

⁶³*Ibid.* h. 25

pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kategori rendah terdapat 34 subjek dengan persentase 36,64%. pada kategori rendah dapat dikatakan bahwa penjangkauan aspirasi masyarakat yang tidak merata, biasanya yang diundang dalam jaring aspirasi bersifat elitis, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi mereka terhadap pembuatan kebijakan atau program – program.

Berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kaho bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat Daerah, baik secara kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak saja di tangan kepala daerah, DPRD, aparat pelaksanaanya , tetapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut.⁶⁴

⁶⁴Josef Riwu Kaho, *Reorganisasi dan Restrukturisasi Pemerintah Dalam Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 2001, <http://www.geocities.com/arsipda/makalah/reorganisasi.html>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil temuan pertama dari persepsi masyarakat Semaka terhadap pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat.
 - a. Prinsip transparansi terdapat pada kategori sedang dengan rentan skor $20 \leq X < 30$ diperoleh 43 responden dengan persentase 48,86%.
 - b. Prinsip akuntabilitas terdapat pada kategori sedang dengan rentan skor $20 \leq X < 30$ diperoleh 75 responden dengan persentase 85,23%
 - c. Prinsip partisipasi masyarakat terdapat pada kategori sedang dengan rentan skor $20 \leq X < 30$ diperoleh 44 responden dengan persentase 50%
2. Hasil temuan kedua besarnya pengaruh dari prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
 - a. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip transparansi memberikan sumbangan efektif paling besar dari prinsip *Good Governance* lainnya sebesar 36,7% terhadap persepsi masyarakat

- b. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas memberikan sumbangan efektif paling kecil dari prinsip *Good Governance* lainnya sebesar 28,6% terhadap persepsi masyarakat
- c. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat memberikan sumbangan efektif sedang dari prinsip *Good Governance* lainnya sebesar 34,7% terhadap persepsi masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kecamatan Semaka

Bagi Masyarakat Kecamatan Semaka diharapkan selalu berperan aktif dalam Pemerintahan Semaka untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan diharapkan dapat menjadi pengawas bagi Pemerintahan Kecamatan Semaka agar tidak terjadi hal – hal yang menyimpang dalam prinsip – prinsip pemerintahan yang baik atau *Good Governance*.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Semaka

Bagi Pemerintah Kecamatan Semaka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan Pemerintah Semaka diharapkan dapat melaksanakan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam pelayanan kepada masyarakat Semaka.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dan mengkaji kembali Persepsi Masyarakat Kecamatan Semaka Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pemerintah Kecamatan Semakalebih cermat dalam pengambilan subjek penelitian. Selain itu, bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Prinsip – Prinsip *Good Governance* yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, Jakarta, Bina Aksara, 2010
- Baran, P.B & Hunt, C.L. *Sosiologi Jilid II. Ed. 6*, Jakarta. Erlangga, 1984
- Dwipayana, AAGN. Ari. *Membangun Good Governance*. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta. 2003
- Dapertemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 3, 2002
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Social Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Hadi, S. *Metode Penelitian Reaserch I* , Yogyakarta: YP Fak.Psikologi UGM, 1985
- Harsono, H, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Hasan, M.I. *Pokok – Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Karina, L.L. *Indikator Alat Ukur Prinsip Kuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003
- Kartono, K. *Pengantar Metodologi Riset sosial*, Bandung : Mandur Maju, cet VIII, 1996
- LAN & BPKP, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Penerbit Lan, 2000
- Leavitt, H.J. *Psikologi Manajemen*, Ed. 4 yang dialih Bahasakan Oleh Muslichah Zarkasi. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986

- Lembaga Administrasi Negara, *Sankri Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Lembaga Andiministasi Negara, 2003
- Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009
- _____, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002
- Masyarakat Transparansi Indonesia Indonesia, 2002, "*Supermasi Hukum*", Modul, Jakarta
- Narbuko, C.&Ahmadi, A.*Metode Penelitian*, Jakarta :Bumi Aksara, 1997
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gama Pers, 1987
- _____,*Instrumen Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University 1995
- Nogi, T.H. *Manajemen Publik*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2005
- Pulukadang. Ishak,"*Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado dibidang Kepemerintahan Yang Baik* ; Makalah, FISIP Unsrat. Manada. 2002
- Rakhmat, J.*Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. cet 26, 2008
- Robbins, S.P, *Perilaku Organisasi Jilid 1*, yang Di Alih Bahasakan Oleh Handyana Pujaatmaka Dan Bunyamin Molan, Penyunting Tanty Tarigan, Jakarta: PT. Prehallindo, 2001
- Saebani, B.A & Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Saputra, L.S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Setia Purna Inves, 2007

- Shadily, H, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Sedarmayati, *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju, 2003
- Setyawan, S.D, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: penerbit djambatan, 2004
- Siagian, S.P, *Teori Motivasi Dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Ke 1, 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, cet.9, 2002
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2014
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhardono, Edi dkk, "*Good governance Untuk Daulat Siapa?*" Forum LSM DIY, Yogyakarta. 2001
- Sulaima, A. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Bandung. CV Arfino Raya, 2015
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Egc, 2004
- Surwono, S.W. *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, Edisi Ke 1. 1982.
- Suyanto, B. *Netode Penelitian Sosial : Alternatif Pendektan*, Jakarta : Kencana, 2005

- Syukur, A. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang, 1987
- Wahab, A, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Ketiga, 2001
- Walgito, B. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, Edisi Ke 2, 2002
- Wibowo, E, *Ilmu Politik Kontemporer*, Yogyakarta: YPPI, 2004
- Widodo, J, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Control Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendikia, 2001

B. Skripsi

- Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2009

C. Artikel dan Jurnal

Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia

Dikutip Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “*Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM

Mudji santoso dalam *jurnal penelitian kuantitatif*

Zullcarnain, happy Bone, 2002, "*Kendala Terwujudnya Good governance*",
Artikel.

D. Internet

<http://kbbi.web.id/prinsip> , diakses pada 15 Mei 2017

<https://jalius12.wordpress.com/2010/04/18/pengertian-fakta-prinsip-dan-konsep>,
diakses pada 15 Mei 2017

www.auditor-intenal.com, diakses pada 18 januari 2019.

<https://www.ksap.org/sap/profil-ksap/>, diakses pada tanggal 08 jaunari 2019